




Yogya Kota Kebangsaan

Yulianingsih

Tahun 2011 ini Kota Yogyakarta akan menambah daftar predikat baru di belakang namanya. Setelah berpredikat kota Pelajar, Kota pendidikan, kota perjuangan, kota budaya dan kota pariwisata, tahun ini Kota Yogyakarta akan menjadi Kota Kebangsaan.

"Kota Kebangsaan merupakan kota yang penuh nuansa penanaman nilai-nilai kebangsaan, nasionalisme dan cinta Tanah Air. Kota yang penuh nilai-nilai persatuan, kesatuan yang tetap menghargai kebhinekaan.

Sebagai Kota Perjuangan, Yogyakarta memang memiliki andil besar dalam perjuangan dan pertahanan kemerdekaan Republik Indonesia. "Yogyakarta ini Kota Perjuangan, Kota Merah Putih dan itu akan kita kuatkan agar auranya semakin terasa bagi bangsa Indonesia ini," kata Wali Kota Yogyakarta Herry Zudianto di satu kesempatan.

Karenanya sejak tahun 2009 lalu, Herry intensif meningkatkan penanaman nilai-nilai



kebangsaan ini dalam diri pelajar, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan masyarakat Kota Yogyakarta. Salah satu langkah untuk penanaman nilai-nilai kebangsaan ini adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 10 Tahun 2010 tentang kewajiban penggunaan pin merah putih di dada kanan setiap PNS. Pin tersebut juga wajib digunakan oleh setiap guru dan pelajar di Kota Yogyakarta.

Pin merah putih ini harus disematkan lebih tinggi dibandingkan pin tematik pembangunan yang disematkan di dada kiri PNS.

Menurut Herry, penggunaan pin ini merupakan bukti tanda cinta terhadap Tanah Air, dan tidak ada yang lebih penting dari kejayaan Indonesia.

Melalui pin ini diharapkan kecintaan terhadap Indonesia bukan hanya formalitas tetapi juga merasuk dalam hati dan diimplementasikan di setiap kegiatan kerja.

Selain penggunaan pin Merah Putih, wali kota juga rutin menggelar upacara bendera tanggal 17 setiap bulannya.

1. Bag. Hukum ✓ Positif

2. Div. Perizinan ✓ Biasa

3. Kan. Kebang ✓ Untuk diketahui

Selain itu Herry juga mengeluarkan Perwal Nomor 5 tahun 2008 tentang kearifan lokal untuk pendidikan di sekolah-sekolah Yogyakarta. Melalui perwal tersebut sekolah-sekolah wajib memberikan pelajaran muatan lokal yang mendidik peserta didik tentang etika, budaya lokal Yogyakarta dan Indonesia secara umum.

Herry sendiri menyadari, beberapa tahun terakhir ini kebebasan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa lebih dihargai. Kebebasan berpolitik, kebebasan berpendapat, lebih terbuka tanpa ada tekanan, larangan maupun ancaman. Namun di tengah semua kebebasan tersebut, Merah Putih diatas segala-galanya.

"Jangan sampai kepentingan-kepentingan politik, kesukuan, golongan sampai bertentangan dengan Merah Putih. Utamakan Merah Putih," tandasnya.

Budaya lokal

Kasubag Perundang-undangan Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta, Rihari Wulandari mengatakan, melalui perwal tersebut setiap peserta didik di Kota Yogyakarta sedini mungkin harus dikenalkan budaya lokal dan budaya Indonesia.

"Nilai-nilai budaya ini tidak bisa dipisahkan dengan nilai-nilai kebangsaan. Nilai budaya ini akan mewarnai nilai kebangsaan sehingga keduanya akan bersinergi dan menjiwai nilai kebangsaan sendiri. Dengan begitu Bhineka Tunggal Ika bukan hanya slogan semata tetapi benar-benar bisa diterapkan secara nyata dengan landasan nilai budaya dan nilai kebangsaan yang ada," terangnya.

Perwal tersebut, pada tahun 2011 ini akan semakin diperkuat dengan Perwal tentang kewajiban sekolah di Yogyakarta untuk mengajak siswanya menyanyikan lagu kebangsaan di awal dan akhir proses belajar. Selain itu juga ada perwal yang mewajibkan seluruh kantor, instansi bahkan mobil dinas untuk memasang bendera merah putih setiap harinya. Bahkan tahun ini pemkot Yogya tengah menyusun Peraturan Daerah (Perda) tentang Wawasan Kebangsaan.

Kabag Hukum Pemkot Yogyakarta, Basuki Hari Saksono mengatakan, saat ini pihaknya melihat orang tidak lagi bangga dengan merah putih. Menurutnya, saat ini orang justru lebih bangga dengan bendera kelompok, bendera partai dan bendera produk iklan.

Ini terlihat dari maraknya bendera-bendera itu yang lebih mendominasi pada setiap perhelatan acara-acara yang digelar masyarakat.

"Seperti ketika terjadi bencana gempa 2006 lalu, bendera parpol dan bendera kelompok lebih mendominasi daripada Merah Putih. Pada hari besar nasional antusiasme masyarakat untuk memasang bendera merah putih juga mulai memudar," jelasnya.

Lebih prihatin lagi kata dia, anak-anak sekolah saat ini juga tidak lagi hafal lagu wajib nasional tapi justru lebih hapal dengan lagu-lagu populer. Kondisi ini menurutnya, jelas telah menggambarkan bahwa nilai-nilai kebangsaan di kalangan masyarakat semakin meluntur. Padahal Yogyakarta selama ini dikenal sebagai Kota Perjuangan. Karena itulah, melalui perda wawasan kebangsaan ke depan diharapkan nilai-nilai kebangsaan dalam masyarakat Yogyakarta semakin tertanam dengan baik.

Terpisah Wulandari mengatakan, pihaknya masih membahas lebih jauh tentang perda wawasan kebangsaan tersebut. "Saat ini tengah kita konsultasikan internal dan akan kita konsultasikan ke provinsi jangan sampai melanggar PP nomor 38 tahun 2007," tegasnya.

Konsultasi itu membahas apa-apa yang bisa diatur dalam perda tentang wawasan kebangsaan ini. Karena dikhawatirkan perda tersebut justru akan mengkotak-kotakkan semangat kebangsaan padahal Indonesia ini satu dalam semangat kebhinekaan.

Karenanya penanaman nilai kebangsaan melalui perda tersebut diharapkan nanti justru tidak mengkotak-kotakkan daerah-daerah tetapi justru menjadi ciri khas Yogyakarta dalam tetap menjaga semangat dan jiwa kebhinekaan tersebut. ■ ed: Indra Wisnu

:: agenda kota ::

Jangan Simbol Tanpa Makna

Dalam penanaman nilai-nilai kebangsaan atau nasionalisme, Kota Yogyakarta menurut Ketua DPRD Henry Kuncoroyekti sudah memiliki modal yang kuat. Karena selama ini Yogyakarta dijuluki sebagai miniatur mini dari Indonesia. Mengapa demikian?

Karena di Yogyakarta berbagai macam suku, agama dan daerah ada dan berkembang serta hidup berdampingan dengan rukun dan damai. "Sebagai kota perjuangan, masyarakat Yogyakarta memiliki semangat juang yang luar biasa dan ini juga modal yang kuat dalam penanaman nilai-nilai kebangsaan," tandasnya.

Namun begitu kata dia, modal kuat yang dimiliki masyarakat Yogyakarta tersebut harus diimbangi dengan kebijakan yang sinergis. Karena revitalisasi dan reaktualisasi nasionalisme atau wawasan kebangsaan perlu dikkritkan dalam bentuk suatu kebijakan terutama dalam era otonomi daerah saat ini.

Hal ini dikarenakan di era otonomi daerah terkadang memunculkan semangat kedaerahan yang berlebihan dan dapat menciptakan disintegrasi nasional.

"Nilai-nilai kebangsaan yang dikembangkan di daerah seperti di Yogyakarta justru bukan untuk disintegrasi bangsa Indonesia tetapi lebih untuk menguatkan kesatuan dan per-

satuan sebagai sebuah negara kesatuan," tambahnya.

Karena itulah kata dia, kebijakan kongret yang dikembangkan Pemkot Yogyakarta untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan tersebut diharapkan tidak mengedepankan nilai kedaerahan tetapi justru nilai kebersamaan, persatuan yang dilandasi budaya lokal.

Hal itu menurut Henry bisa dilakukan dengan terus memberdayakan budaya warga kota Yogya yang terdiri dari beragam suku yang merupakan modal sosial dan aset nasional sebagai kota yang penuh to-

leransi (*city of tolerance*).

Di sisi lain, kata dia, juga perlu dipikirkan untuk membangun semangat kebangsaan dalam bentuk menyediakan ruang-ruang publik (*public sphere*) kepada warga Yogya untuk mendiskusikan atau mendialogkan masalah kebangsaan secara rasionalitas komunikatif.

"Karenanya ke depan, kebijakan dalam konteks mewujudkan wawasan kebangsaan di Kota Yogya seharusnya diarahkan untuk dapat mewujudkan nilai-nilai nasionalisme dalam wujud yang konkrit tidak sekedar menjadi simbol tanpa makna," tandasnya. ■



FOTO: FOTO: YULIANINGSIH/REPUBLICA

Pasang Bendera Wajib Hukumnya

Untuk menumbuhkan dan menanamkan nilai-nilai kebangsaan dalam diri masyarakat, Wali Kota Yogyakarta mewajibkan seluruh pengusaha untuk mengibarkan bendera merah putih di setiap tempat usaha mereka. Aturan pengibaran bendera merah putih tersebut disyaratkan dalam kepengurusan izin gangguan atau HO melalui Dinas Perizinan setempat.

"Itu kita masukkan dalam persyaratan HO. Semua pengusaha yang mengurus HO harus membuat pernyataan kesanggupan memasang bendera merah putih di depan usahanya, dan ini wajib," terang Wali Kota Herry Zudianto.

Surat kesanggupan yang dibubuhi materai tersebut menurut kepala Dinas Perizinan setempat Hery Karyawan bisa dijadikan landasan penerapan sanksi jika yang bersangkutan tidak melaksanakannya. "Jika ke depan tidak dilaksanakan maka sanksinya bisa berupa teguran dan terus bertahap hingga pencabutan izin," terangnya.

Selain itu setiap perkantoran di Kota Yogyakarta juga diwajibkan mengibarkan bendera merah putih di halaman kantor tersebut. Begitupula setiap mobil dinas di Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta juga wajib memasang bendera merah putih.

Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan memulai bekerja di Pemkot Yogyakarta juga selalu dibekali wawasan kebangsaan. Melalui pembekalan dan pemantapan wawasan kebangsaan tersebut setiap CPNS diharapkan bisa menjalankan profesinya secara maksimal.

"PNS harus lebih mengedepankan integritas, loyalitas, dan totalitas dalam mengemban profesi sebagai abdi dan pelayanan masyarakat," tandas Herry.

Menurutnya, setiap CPNS harus memiliki visi yang jelas yakni mau menjadi bagian dari penegakan pemerintahan yang baik, bersih dan transparan. Wawasan kebangsaan semacam inilah menurutnya yang harus dimiliki setiap CPNS di Kota Yogyakarta. ■

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Positif	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Perizinan			
3. Kantor Kesatuan Bangsa			

Yogyakarta, 24 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005